

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Achmad Ali, 1996. *Menguak Tabir Hukum (suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Chandra Pratama
- Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta
- Adrian Sutedi. 2014. *Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan berbagai Permasalahannya. Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Agus Dwiyanto, dkk. 2002, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Yogyakarta, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada
- Budi Harsono, *Hukum Agrarian Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya)*, Djembatan, Jakarta
- Darsono Dan Tjatjuk, Siswandoko, 2011, *Manajemen Sumber Daya Manusia. Abad 21*, Nusantara Consulting, Jakarta.
- Hardiyansyah, 2011, *Kualitas Pelayanan Publik (Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya)*, Gava Media, Yogyakarta
- Keban, T. Yeremias. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Gava Media. Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2001, *Desentralisasi Sistem dan Desentralisasi Fiskal*, Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Muslimin B Putra, 2015, *Pola Penyelenggaraan Pelayanan Publik*, Bidang Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan Sulsel, disampaikan pada perkuliahan Mahasiswa Non Reguler, Makassar 15 April 2015.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta
- Sedarmayanti. 2001. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Mandar Maju. Jakarta
- Setiono, 2005, *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana UNS, Surakarta
- Siagian, Sondang P. 2001. *Peranan Staf dan Manajemen*. Penerbit CV. Gunung. Agung. Jakarta.
- Sri Ratin, 2014, *Bahan Ajar Mata Kuliah Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum* Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung

Suharsimi Arikunto, 2013, *Prosedur Penelitian*, Rineka cipta, Jakarta

Sutrisno Hadi, 1981, *Metodologi Research I*: YPPF UGM, Yogyakarta

Penelitian

Lisarso Lanton, 2018, *Pelayanan Penerbitan Sertipikat Tanah Melalui Layanan Rakyat Sertipikat Tanah (Larasita) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai*, Jurnal Publication Vol.2 No.1 April 2018

Mohammad Eddy Saputra, 2017, *Analisis Pelaksanaan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) Di Kantor Pertanahan Kota Samarinda*, Jurnal Administrasi Reform Vol.5 No.2 Juni 2017

Mohammad Fadli, 2014, *Transparansi Pemerintah dalam Pelayanan Sertipikat Tanah di Kota Makassar*, Jurnal Otoritas Vol.IV No.2 Oktober 2014

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan dan Keputusan :

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom

Keputusan MENPAN No. 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Permendagri No 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 002 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang LARASITA Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 18 Tahun 2009 tentang Larasita Badan Pertanahan Nasional

Website:

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2015, diakses dari <http://kbbi.web.id/pelayanan> pada tanggal 01 Agustus 2019 pukul 13.45 WIB.